

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR DI DESA TOLOMBUKAN SATU KECAMATAN  
PASAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**FIFIE RORONG**

**JOYCE J. RARES, M.Si**

**JOORIE M. RURU, M.Si**

**Abstrac: Public participation in policy development in countries that implement democracy including in Indonesia is not new. Public participation is a process to provide technical opportunities and broader authority to the community together to solve various problems. As a concept and practice of development, the concept of participation recently discussed in the 1960s when various international institutions promote participation in the practice of planning, implementation, and evaluation of development.**

**This research was conducted at 9 : 1 the village chief informant. 1 sysop BPD, sysop LPM, 1 religious figures, and 5 members of the public. The techniques of data collection is done by way of interviews, observation and documentation. And data analysis techniques used are information gathering, data presentation, data reduction and withdrawal of the conclusion.**

**Keywords : public participation, development, infrastructure**

**PENDAHULUAN**

Partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan di negara-negara yang menerapkan demokrasi termasuk di Indonesia bukanlah hal yang baru. Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat secara bersama-sama untuk memecahkan berbagai

persoalan. Sebagai suatu konsep dan praktek pembangunan, konsep partisipasi baru dibicarakan pada tahun 60-an ketika berbagai lembaga internasional mempromosikan partisipasi dalam praktek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Pentingnya masyarakat dalam pembangunan desa ialah untuk mengingat masyarakat setempat yang lebih

mengetahui berbagai permasalahan seperti, pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang ada sehingga memudahkan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Landasan hukum pelaksanaan partisipasi masyarakat tertuang dalam UUD 1945 yang menyebutkan bahwa partisipasi adalah hak dasar warga negara, dan partisipasi politik sebagai prinsip dasar demokrasi. Dalam Pasal 78 ayat 1 dan 2 UU No. 6 Tahun 2014 dikatakan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung

seperti sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat atau bahkan penolakan dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Sejauh ini, partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program-program atau kegiatan pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan, tetapi juga mulai dari tahap perencanaan pengambilan keputusan.

Pada Kabupaten Minahasa Tenggara, dalam menunjang kegiatan pembangunannya, maka visi dan misi yang harus dicapai adalah peningkatan kinerja pembangunan daerah. Oleh karena itu, dalam menunjang visi dan misi tersebut maka keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi hasil pembangunan sangat penting terutama di tingkat desa. Namun, jika kita melihat ke belakang bahwa mulai dari tahap perencanaan pembangunan yang menggunakan pola berjenjang dari bawah ke atas (*Bottom-Up*), ternyata tidak banyak menjanjikan aspirasi murni warga desa atau kelurahan

untuk didengar. Begitu pun halnya dalam pelaksanaan proyeknya yang masih menggunakan sistem tender, di mana tender yang dimaksud melibatkan para kontraktor sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang basisnya tentu berada di desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa ternyata keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan hanya selesai pada tahap perencanaan yang pada tahap itupun masih banyak langkah-langkah yang belum terlaksana dengan baik, sehingga implementasi pola tersebut dapat dikritisi mengandung banyak kelemahan. Misalnya, partisipasi masyarakat selaku penerima manfaat sangat lemah, hasil dari berbagai forum koordinasi di tingkat lebih rendah (desa/ kelurahan) kadang tidak digubris oleh pemerintah yang lebih tinggi, serta mekanisme perencanaan mulai dari musrenbang desa hanya bersifat mencatat daftar kebutuhan masyarakat ketimbang sebagai proses perencanaan yang partisipatif. Proses tersebut akhirnya menjadi proses birokratis yang sangat panjang dan lama sehingga masyarakat tidak

mendapat kepastian kapan kebutuhannya akan terwujud.

Bila demikian adanya, maka realita ini tentu saja dapat menghambat jalannya proses pembangunan yang melibatkan masyarakat di dalamnya (partisipatif). Padahal, sebagai mana yang telah dijelaskan di atas bahwa macetnya pembangunan partisipatif akan memunculkan pola-pola pembangunan yang tidak aspiratif. Hal tersebut di atas kemudian memunculkan pertanyaan di Kecamatan Pasan, khususnya di Desa Tolombukan Satu bahwa apakah partisipasi masyarakat didalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur telah terlaksana dengan baik yang menjadikan masyarakat tidak lagi menjadi objek pembangunan akan tetapi telah menjadi subyek pembangunan dengan maksud bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bukan hanya sekedar dilihat dari antusiasme masyarakat dalam menghadiri musrenbang, akan tetapi bagaimana kepentingan mereka telah direspon oleh pemerintah, serta bagaimana proses keterlibatan mereka baik dalam tahap

perencanaan sampai tahap pelaksanaan proyek pembangunannya karena antusiasme masyarakat yang kemudian lahir ketika substansi dari proses pembangunan itu telah tercipta.

Melalui pra survei, ditemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan belum sesuai yang diharapkan. Dan masih ada permasalahan yang sering membelit terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Tolombukan Satu yang peneliti lihat secara langsung maupun berdasarkan isu yang beredar sebagai berikut : *pertama*, partisipasi dalam pengambilan keputusan yang pada kenyataannya banyak masyarakat yang masih tidak mau berpartisipasi dalam tahap ini dan bahkan ada beberapa dari masyarakat tidak dilibatkan oleh pemerintah Desa Tolombukan Satu dalam proses pengambilan keputusan. *Kedua*, mencakup partisipasi dalam pelaksanaan yang pada kenyataannya ada dari masyarakat yang tidak mau ikut terlibat dalam berbagai program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa dikarenakan kurang ajakan ataupun pemberitahuan dari

pemerintah desa dan karena dipengaruhi oleh kepentingan pribadi masing-masing yang mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat di Desa Tolombukan Satu semakin menurun. *Ketiga*, mencakup partisipasi dalam pemanfaatan dimana dalam hal ini masyarakat sebagai penerima dari manfaat program-program pembangunan. Yang pada kenyataannya terjadi masih ada masyarakat yang tidak memanfaatkan fasilitas dari program pembangunan yang dibuat oleh pemerintah desa seperti pembangunan jalan setapak yang tidak digunakan oleh masyarakat dan kurangnya kepedulian dari masyarakat dalam merawat dan menjaga setiap hasil pembangunan yang ada. *Keempat*, partisipasi dalam evaluasi yang mencakup pada partisipasi masyarakat untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan sampai pada evaluasi dan pada kenyataannya terjadi di Desa Tolombukan Satu masyarakat masih kurang berpartisipasi dikarenakan tidak adanya pemberitahuan yang jelas dari pemerintah desa. Terlihat dari adanya beberapa program pemberdayaan masyarakat di desa,

semangat partisipasi masyarakat di desa masih tergolong rendah.

### **Partisipasi**

Partisipasi juga dapat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka. Partisipasi pada hakekatnya juga menyangkut keterlibatan mental dan emosional atau perilaku seseorang sebagai masyarakat, serta fisik seseorang dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang dilaksanakan dalam proses belajar mengajar serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya.

Menurut Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Astuti (2011) membedakan partisipasi menjadi empat jenis yaitu, pertama partisipasi dalam pengambilan keputusan, kedua partisipasi dalam pelaksanaan, ketiga partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan dan keempat partisipasi dalam evaluasi.

*Pertama*, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut

kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

*Kedua*, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.

*Ketiga*, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.

*Keempat*, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan

sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

### **Partisipasi Masyarakat**

Pada saat ini metodologi partisipasi untuk pembangunan desa dan kota sedang mengalami krisis. Terdapat beragam konsep partisipasi, dari kata lain untuk mobilisasi (misalnya partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan) sampai konsep pilihan tindakan berdasarkan kesadaran sendiri.

Menurut Cohen dan Uphoff (1977), adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan merupakan hal dan memiliki arti penting bagi keberhasilan pembangunan itu sendiri.

### **Pembangunan**

Pengertian pembangunan disini diartikan sebagai suatu "proses" pembangunan sebagai proses menggambarkan adanya pengembangan, baik meliputi proses pertumbuhan (*growth*) ataupun perubahan (*change*) dalam kehidupan bersama (organisasi) sosial dan budaya. Hal ini merupakan

gambaran umum dari masyarakat luas (*society*). Menelaah pembangunan dalam masyarakat adalah hal yang baru dalam sejarah.

### **Pembangunan Desa**

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan desa ini memiliki arti dan peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Pembangunan merupakan pemanfaatan hasil pembangunan fisik desa yaitu dengan membangun atau memperbaiki sarana dan prasarana yang akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat desa. Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat.

### **Pembangunan Infrastruktur**

Pembangunan infrastruktur adalah suatu rangkaian yang terdiri atas beberapa bangunan fisik yang masing-masing saling mengkait dan saling ketergantungan satu sama lainnya. Menurut Grigg (dalam Kodoatie, 2005) infrastruktur

merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung, dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Misalnya dalam pembangunan jalan, dimana jalan adalah merupakan sarana yang salah satu fungsinya dapat dipengaruhi dan mempengaruhi beberapa sektor lainnya seperti, pemukiman, perdagangan, kawasan industri, wilayah pusat pemerintahan dan lain sebagainya, sehingga setiap kali terjadi pembangunan infrastruktur seyogyanya diperlukan koordinasi secara mendalam dan antisipatif antar institusi terkait agar pemanfaatannya dapat berfungsi secara maksimal dan berdayaguna tinggi serta nyaman bagi masyarakat pengguna.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, yang didasari dari sejumlah masalah yang tertuang dalam latar belakang masalah penulis serta disesuaikan dengan tujuan peneliti, maka penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif bersifat

deskriptif. Model penelitian kualitatif ini biasanya digunakan dalam pengamatan dan penelitian sosial.

### **Pembahasan**

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa yang diharapkan, diperlukan keterlibatan seluruh masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur adalah kesadaran yang tidak bisa muncul dengan sendirinya, oleh karena itu kesadaran tersebut harus dibimbing dan diarahkan. Dengan adanya keterlibatan itu, maka suatu pembangunan akan bisa dirasakan secara merata dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa sangat diharapkan guna memberikan masukan kepada pemerintah mengenai apa sebenarnya yang mereka butuhkan. Partisipasi masyarakat yang muncul adalah adanya dukungan dari mereka yang merupakan dorongan bagi pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Karena itu, tanpa adanya partisipasi maka dipastikan suatu desa tidak akan bisa melaksanakan pembangunan desa dengan baik. Dan berikut merupakan

pembahasan yang ditelusuri berdasarkan indikator-indikator, yaitu :

(a) Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan suatu keputusan merupakan hal yang sangat penting untuk masyarakat karena masyarakat dapat mengemukakan setiap pendapat dan menentukan keputusan-keputusan atau kebijakan apa yang akan diputuskan dan yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari masyarakat. Dalam hal tersebut masyarakat dibebaskan memberikan usulan atau ide-ide, saran dan kritik tentang pembangunan infrastruktur desa dengan cara melalui rapat atau pertemuan yang diadakan antara masyarakat dan pemerintah. Dari hasil penelitian yang dilakukan, pemerintah desa telah melakukan usaha-usaha untuk melibatkan masyarakat dalam suatu rapat atau pertemuan atau musyawarah mengenai pembangunan desa, tetapi kebanyakan dari masyarakat yang masih kurang menyadari bahwa betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses

pengambilan keputusan. Sehingga pada saat diadakan rapat mengenai pembangunan desa kehadiran dari masyarakat masih kurang atau rendah. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa sangat diperlukan, karena masyarakat merupakan bagian yang sangat penting untuk mendapatkan suatu usulan atau informasi sebagai bahan pada pelaksanaan kegiatan pembangunan desa kedepan.

(b) Partisipasi Dalam Pelaksanaan

Pada dasarnya partisipasi dalam pembangunan ini lebih menekankan pada keterlibatan masyarakat secara langsung. Partisipasi dalam pelaksanaan ini merupakan partisipasi yang dilakukan dalam bentuk memberikan bantuan berupa bantuan tenaga dan sumbangan dana. Sifat gotong royong serta kesadaran dari setiap masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa sangat dibutuhkan. Karena tanpa adanya bantuan gotong royong dari masyarakat desa, pelaksanaan pembangunan desa tidak akan berjalan dengan baik karena pelaksanaan pembangunan yang baik ialah pembangunan yang tumbuh

dari kesadaran dan kepedulian yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan sifat sukarela atau dengan sepenuh hati yang nantinya akan merasakan dampak positif dari setiap hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sendiri. Hal-hal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa adalah rasa kurang kepedulian dari masyarakat yang lebih mementingkan kepentingan atau kesibukan masing-masing. Padahal kepedulian dari masyarakatlah yang nantinya akan memberikan perkembangan atau pertumbuhan bagi pembangunan desa yang ada.

#### (c) Partisipasi Dalam Pengambilan Manfaat

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat adalah partisipasi dalam bentuk menggunakan, menjaga, merawat dan memelihara setiap hasil pembangunan desa, karena masyarakat merupakan objek yang terlibat langsung dalam penggunaan dan pemeliharaan hasil pembangunan. Tetapi dalam pengambilan pemanfaatan, perawatan dan pemeliharaan hasil

pembangunan kesadaran dan kepedulian masyarakat masih kurang yang terkadang membuat setiap pembangunan desa yang sudah dibangun mengalami kerusakan. Padahal menjaga, merawat dan memelihara setiap hasil pembangunan desa itu adalah merupakan bagian atau tugas dari masyarakat yang menggunakannya. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sering dipengaruhi oleh pekerjaan seseorang. Dan pekerjaan dari seseorang memberikan pengaruh terhadap keterlibatannya dalam kegiatan pemanfaatan menjaga, merawat dan memelihara pembangunan yang ada didesa. Hal inilah yang diperlukan oleh pemerintah dan setiap masyarakat untuk saling membantu memperhatikan setiap bangunan desa yang sudah dibangun untuk dapat digunakan setiap saat dan yang bisa digunakan dalam waktu yang lama.

#### (d) Partisipasi Dalam Evaluasi

Partisipasi dalam evaluasi hasil pembangunan ini lebih kepada penilaian dalam mengawasi dan mengontrol setiap pembangunan yang sedang berjalan. Tujuan dari evaluasi ini juga dapat dijadikan

pembelajaran dan bahan pertimbangan dalam melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa kedepan. Untuk melakukan evaluasi hasil pembangunan tersebut biasanya pemerintah melakukan rapat atau pertemuan dengan melibatkan masyarakat yang membahas dan membicarakan hasil-hasil dari pembangunan desa yang sudah dilaksanakan. Pada proses evaluasi selain membicarakan hasil-hasil dari pembangunan yang sudah dilaksanakan, masyarakat juga sering memberikan penilaian berupa menyampaikan kritikan dan saran mengenai pembangunan desa yang sudah dilaksanakan kepada pemerintah, karena saat dalam proses pembangunan desa pemerintah kurang memberikan perhatian kepada masyarakat. Selain kritikan, masyarakat juga menyampaikan saran kepada pemerintah agar proses pembangunan desa kedepan boleh berjalan lebih baik.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, dengan ini peneliti menyimpulkan bahwa :

- (a) Partisipasi dalam pengambilan keputusan didesa Tolombukan Satu masih tergolong kurang atau rendah karena dimana kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menghadiri rapat musyawarah atau pertemuan-pertemuan untuk membahas dan menghasilkan suatu program kegiatan pembangunan infrastruktur desa hanyalah beberapa orang perwakilan masyarakat saja.
- (b) Partisipasi dalam pelaksanaan didesa Tolombukan Satu juga masih rendah terutama kesadaran dan keterlibatan dari masyarakat karena dalam proses pelaksanaan pembangunan desa ada beberapa orang yang dipengaruhi atau sibuk dengan kepentingan masing-masing.
- (c) Partisipasi dalam pengambilan manfaat yang didalamnya kesadaran menjaga, merawat dan memelihara setiap hasil dari pembangunan desa yang sudah dilaksanakan juga masih rendah yang membuat hasil dari pembangunan infrastruktur

desa mengalami kerusakan atau tidak terawat.

- (d) Partisipasi masyarakat dalam evaluasi di desa Tolombukan Satu sering mengkritik pemerintah, karena penilaian masyarakat selama berjalannya kegiatan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah kurang memberikan perhatian yang membuat semangat masyarakat menurun.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur Desa Tolombukan Satu, maka peneliti mengemukakan beberapa saran diantaranya :

- (a) Disarankan kepada pihak pemerintah agar lebih meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat Desa Tolombukan Satu dalam pembangunan yang akan dilakukan, seperti memberikan sosialisasi dan bimbingan bagi masyarakat desa mengenai pentingnya pembangunan.
- (b) Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa diharapkan

pemerintah dapat mencari waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan pembangunan karena masyarakat terkadang dipengaruhi atau disibukan dengan pekerjaan masing-masing.

- (c) Diharapkan kepada pemerintah dan masyarakat Desa Tolombukan Satu untuk lebih menyadari betapa penting menjaga dan merawat setiap hasil pembangunan yang sudah ada agar dapat digunakan setiap saat dan dalam waktu yang lama.
- (d) Selanjutnya diharapkan kepada pemerintah desa dan masyarakat agar dapat menjalin hubungan kerjasama dalam mengawasi jalannya setiap kegiatan pembangunan desa dan juga saling memberikan dukungan serta semangat terhadap satu dengan yang lain dalam setiap kegiatan pembangunan desa.

### **Daftar Pustaka**

Ahmad, Jamalludin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Jakarta : Gavamedia.

- Damsar, D dan Indrayani. 2016. *Pengantar Sosiologi Pedesaan*. Jakarta : Kencana.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Indrawijaya Ibrahim dan Pranoto, Juni H. 2011. *Revitalisasi Administrasi Pembangunan (berbasis jatidiri dan karakter bangsa dalam pembangunan nasional)*. Bandung : Alfabeta
- Kodoatie, Robert J. 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Lexy Maelong. 2013. *Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Partisipasi Masyarakat Pedesaan Dalam Pembangunan di Beberapa Desa*. Jakarta : Yayasan Karya Dharma.
- Slamet. M. 2003. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta : Sebelas Maret University Press.
- Slamat, M. 2003. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta : Sebelas Maret University Press.
- Siagian, S. P. 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sugiono. 2004. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Syaodih, Ernapy. 2015. *Manajemen Pembangunan Kabupaten dan Kota*. Bandung : Refika Aditama.